

Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2014-2018

Listya Devi Junaidi*, Malesa Anan

Universitas Dharmawangsa, Medan

*Correspondence e-mail: listyadevi@dharmawangsa.ac.id

Abstract. *It is very important to measure financial performance to assess the accountability of local governments in managing regional finances. Accountability is not just the ability to show how public money is spent but includes the ability to show how public money is spent efficiently, effectively and economically. The problem that is currently being faced by the Medan City Government is the fluctuating percentage of PAD achievement of the Medan City Government from 2014 – 2018. This study aims to determine the financial performance of Medan City measured based on the Regional Financial Independence Ratio Analysis, PAD Effectiveness Ratio, PAD Efficiency Ratio, Ratio Degree of Fiscal Decentralization, Growth Ratio and Harmony Ratio for the period 2014-2018. This study uses a quantitative descriptive method that is doing calculations on the financial data obtained to solve problems that occur by analyzing the ratio of regional financial independence, PAD effectiveness ratio, PAD efficiency ratio, fiscal decentralization degree ratio, growth ratio and compatibility ratio. The results of this study indicate that the financial performance of the Medan City Government is quite good from the aspect of independence with the "participatory" category, then from the aspect of the effectiveness ratio and efficiency ratio, it is still necessary to pay attention again because the average ratio results show the category of being less effective and less efficient. On the aspect of the degree of decentralization, the results show a "medium" category where the amount of PAD contributes quite well to regional income in Pemko Medan. The resulting compatibility ratio shows that the percentage of the use of APBD for operational expenditure is higher at 76.7% compared to capital expenditure, which is 23.2%. The results of the regional income and expenditure growth ratio in the Medan City Government have decreased and increased every year.*

Keywords : *Financial Performance; Medan City Government*

Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Menurut Darwanis dkk (Darwanis, Jalaluddin, Julitawati, 2012), berpendapat bahwa Pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan daerah telah ditetapkan pada PP Pasal 4 No.105 Tahun 2000 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 105 Tahun 2000, 2000) yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila kinerja keuangan daerah dilakukan dengan baik, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri.

Menurut Kamus Akuntansi Manajemen, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran Kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non-keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Sucipto (Sucipto, 2005) menyatakan bahwa definisi "Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang public dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang public tersebut dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan saat ini yaitu fluktuatifnya presentase pencapaian PAD Pemerintahan Kota Medan dari Tahun 2014 – 2018.

Tabel 1.
Presentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Pemko Medan Tahun Anggaran 2014-2018

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
1	2014	Rp. 1.515.685.946.873,00	Rp. 1.300.000.000.000,00	85,76%
2	2015	Rp. 1.794.704.774.012,45	Rp. 1.411.775.146.897,36	78,66 %
3	2016	Rp. 1.827.196.828.389,00	Rp. 1.535.309.574.014,91	81,46%
4	2017	Rp. 1.973.780.338.563,00	Rp. 1.739.756.922.633,50	79,82%
5	2018	Rp. 2.112.663.069.116,00	Rp. 1.636.204.514.683,53	77,45%

Sumber: data olahan

Berdasarkan tabel 1, terlihat presentase pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kota Medan mengalami penurunan di tahun 2015 dengan pencapaian sebesar 78,66% yang sebelumnya di tahun 2014 presentase pencapaian sebesar 85,76%. Selanjutnya di tahun 2016 mengalami peningkatan dengan pencapaian sebesar 81,46% dari tahun 2015, lalu mengalami sedikit penurunan lagi di tahun 2017 dengan pencapaian sebesar 79,82% dan menurun lagi ditahun 2018 sebesar 77,45%. Tujuan enelitian ini adalah untuk melakukan penelitian di Pemerintahan Kota Medan.

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan menggunakan alat ukur yang jelas dan tervalidasi. Data yang diperoleh adalah data digital, dan digunakan metode yang jelas dan sistematis untuk analisis kuantitatif dan kualitatif. Subjek riset adalah sesuatu yang menjadi pokok riset, yaitu Riset ini dilakukan di pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai. Dengan menjadi tempat peneliti untuk mendapatkan informasi dan data yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Kota Medan. Sedangkan yang menjadi objek pada riset ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintahan Kota Medan Periode Tahun 2014-2018. Menurut (Nazir, 2009), Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memerlukan data yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam pengambilan pengumpulan data yaitu Metode dokumentasi dan Metode Kepustakaan. Riset ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan riset. Rasio yang digunakan dalam metode analisis ini adalah:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut (Mahmudi, 2016), hubungan daerah yang mandiri secara finansial menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan bagi masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan di daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai pendapatan PAD yang direncanakan dan menetapkan tujuan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya (Mahmudi, 2016). Rasio efektivitas dapat diukur:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi adalah indeks yang menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Semakin rendah indikatornya, semakin efektif, dan sebaliknya. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan total pendapatan daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar kontribusi PAD maka semakin besar pula peluang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi. Rasio derajat desentralisasi dapat dihitung dengan ,menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

e. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Secara sederhana rasio keserasian menurut mahmudi dapat diformulasikan sebagai berikut (Mahmudi, 2016).

$$\text{Rasio BM terhadap Total BM} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio BO terhadap Total BO} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

f. Rasio Pertumbuhan

Tingkat pertumbuhan mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan mereka dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin tinggi komponen pendapatan dan belanja pribadi maka semakin baik pula kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pada setiap periodenya (Halim, 2016). Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan } Th_t = \frac{\text{Pendapatan } Th_t - \text{Pendapatan } Th_{t-1}}{\text{Pendapatan } Th_{t-1}} \times 100\%^{25}$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja } Th_t = \frac{\text{Realisasi Belanja } Th_t - \text{Realisasi belanja } Th_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja } Th_{t-1}} \times 100\%^{26}$$

Hasil

Rasio Kemandirian

Tabel 2.
Rasio Kemandirian APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	(%)	Keterangan
2014	Rp 1.678.116.623.125	Rp 1.691.495.158.660	99,2	Delegatif (Tinggi)
2015	Rp 1.794.704.774.012	Rp 3.243.256.160.750	55,3	Partisipatif (Sedang)
2016	Rp 1.884.851.580.563	Rp 3.605.032.623.407	52,3	Partisipatif (Sedang)
2017	Rp 1.973.780.338.563	Rp 2.236.515.051.000	88,3	Delegatif (Tinggi)
2018	Rp 2.112.663.059.116	Rp 3.126.744.952.000	67,6	Partisipatif (Sedang)

Sumber: data olahan

Berdasarkan tabel 2 diatas mengenai perhitungan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Medan di tahun 2014 jumlahnya sebesar 99,2% menurun di tahun 2015 dan tahun 2016 yang masing-masing sebesar 55,3% dan 52,3%. Akan tetapi di tahun 2017 mengalami peningkatan tingkat kemandirian dimana jumlahnya menjadi sebesar 88,3%. Kemudian menurun kembali di tahun 2018 sebesar 67,6%. Secara keseluruhan dilihat dari persentasi kemandirian keuangan daerah pola hubungan di Pemerintah Kota Medan adalah pola hubungan delegatif dan partisipatif. Pola hubungan delegatif artinya peranan Pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada Pemerintah Kota Medan. Sedangkan pola hubungan partisipatif yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat kemandirian daerah otonom yang bersangkutan telah mampu menyelesaikan urusan otonomi, peran pemberian konsultasi akan beralih peran partisipasi pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian memiliki arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, begitupula sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat ditunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Medan tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 masuk ke dalam kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif. Hal tersebut dibuktikan dari persentase hasil perhitungan diatas meskipun sebagian besar mengalami penurunan, namun rata-rata rasio kemandirian secara keseluruhan diatas 50% yang artinya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat semakin rendah.

Rasio Efektivitas

Tabel 3.
Rasio Efektifitas APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio (%)	Keterangan
2014	Rp 522.423.349.627	Rp 1.678.116.623.125	31,1	Tidak Efektif
2015	Rp 1.411.775.146.897	Rp 1.794.704.774.012	78,7	Kurang Efektif
2016	Rp 1.535.309.574.015	Rp 1.884.851.580.563	81,5	Kurang Efektif
2017	Rp 1.739.756.922.634	Rp 1.973.780.338.563	88,1	Kurang Efektif
2018	Rp 1.636.204.514.684	Rp 2.112.663.059.116	77,4	Kurang Efektif

Sumber: data olahan

Tabel 3 menunjukkan volume rasio efektifitas Kota Medan yang kurang baik, dengan hasil rata-rata 71,4% selama kurun waktu tahun anggaran 2014-2018. Pada tahun 2014 rasio efektifitas sebesar 31,1% dimana realisasi penerimaan jauh lebih rendah dari target penerimaan yang ditetapkan. Tahun 2015 rasio efektifitas meningkat menjadi 78,7% dimana realisasi penerimaan belum mampu melampaui dari target penerimaan yang ditetapkan. Tahun 2016, terjadi peningkatan kembali terhadap rasio efektifitas menjadi 81,5% namun realisasi penerimaan masih lebih kecil dari target yang ditetapkan. Tahun 2017 terjadi peningkatan rasio efektifitas menjadi 88,1% dimana realisasi penerimaan masih lebih kecil dari target penerimaan yang telah ditetapkan. Tahun 2018 terjadi penurunan rasio efektifitas menjadi 77,4% dimana realisasi penerimaan jauh lebih kecil dari target penerimaan yang ditetapkan. Berdasarkan keseluruhan, hasil rata-rata rasio efektifitas yang diperoleh menunjukkan katagori Kurang Efektif, maka dari itu terjadinya penurunan realisasi penerimaan harus lebih ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, khususnya pada upaya optimalisasi pemungutan pajak maupun retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah.

Rasio Efisiensi

Tabel 4.
Rasio Efisiensi APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
2014	Rp1.523.890.221.227	Rp1.900.484.785.689	80,2	Cukup Efisien
2015	Rp4.316.645.669.628	Rp4.181.096.448.524	103,2	Tidak Efisien
2016	Rp4.523.672.134.655	Rp4.308.116.916.025	105,0	Tidak Efisien
2017	Rp4.394.045.824.265	Rp4.409.065.482.201	99,7	Kurang Efisien
2018	Rp4.213.480.509.726	Rp4.253.618.758.533	99,1	Kurang Efisien

Sumber: data olahan

Tabel 4 menunjukan rasio efisiensi pada tahun 2014 sebesar 80,2%, tahun 2015 sebesar 103,2%, tahun 2016 sebesar 105%, tahun 2017 sebesar 99,7% dan pada tahun 2018 sebesar 99,1%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kota Medan tahun anggaran 2014-2018 dikategorikan kurang efisien dengan tingkat rata-rata pencapaian efisiensi sebesar 97,4%. Pencapaian ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah dalam pemungutan PAD kurang efisien yang ditandai dengan trend rasio dibawah 100%. Artinya untuk menghasilkan output yang optimal pemerintah daerah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Penghematan anggaran serta pengalokasian pos-pos anggaran pembiayaan sebaiknya mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan daerah untuk mewujudkan kinerja keuangan daerah yang sesuai prinsip *value for money* yang ekonomis, efektif dan efisien.

Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 5.
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Ket
2014	Rp1.678.116.623.125	Rp4.560.412.529.544	36,8	Sedang
2015	Rp1.794.704.774.012	Rp5.046.111.839.162	35,6	Sedang
2016	Rp1.884.851.580.563	Rp5.490.162.683.365	34,3	Sedang
2017	Rp1.973.780.338.563	Rp5.264.198.010.129	37,5	Sedang
2018	Rp2.112.663.059.116	Rp5.239.408.011.116	40,3	Baik

Sumber: data olahan

Hasil dari perhitungan yang didapat menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada Tabel 5. Pada Tabel 5 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan. Karena terdapat penambahan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan dan lainnya dari tahun sebelumnya. Pada saat tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah Kota Medan yaitu sebesar Rp 1.678.116.623.125 atau sebesar 36,8% dari total pendapatan daerah. Lalu pada tahun 2015 terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah dan dari tahun sebelumnya menjadi Rp 1.794.704.774.012, namun total pendapatan di tahun ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga menurunkan rasio derajat desentralisasi menjadi 35,6%. Kemudian pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah Kota Medan juga mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.884.851.580.563, namun total pendapatan juga mengalami peningkatan lagi sehingga menurunkan derajat desentralisasi menjadi 34,3%. Selanjutnya di tahun 2017 Pendapatan

Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 1.973.780.338.563 atau sebesar 37,5% dari total pendapatan daerah. Dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan lagi dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 2.112.663.059.116 dari Total Pendapatan Daerah.

Rasio Keserasian

Tabel 6.
Rasio Keserasian Belanja Operasi Pemko Medan Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi (%)
2014	Rp3.586.613.324.151	Rp4.625.169.924.881	77,5
2015	Rp4.111.280.501.953	Rp5.467.952.757.114	75,2
2016	Rp4.413.092.921.342	Rp5.735.922.591.995	76,9
2017	Rp4.140.665.154.022	Rp5.493.560.943.295	75,4
2018	Rp4.274.124.864.704	Rp5.449.562.922.528	78,4

Sumber: data olahan

Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada Tabel 6. Dari hasil perhitungan pada Tabel 6 diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Kota Medan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 terjadi kenaikan. Karena terdapat penambahan Belanja Daerah yang terdiri dari : Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 realisasi belanja daerah Kota Medan yaitu Rp 4.625.169.924.881, lalu pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.467.952.757.114 dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.735.922.591.995. Kemudian, pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan karena berkurangnya Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan menjadi Rp 5.493.560.943.295 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar Rp 5.449.562.922.528. Berdasarkan hasil dari perhitungan pada tabel 6 diatas diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan jika dilihat dari belanja operasi pada tahun 2014 yaitu 77,5%, lalu pada tahun 2015 mengalami penurunan karena berkurangnya Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan menjadi 75,2%. Kemudian pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 76,9%. Selanjutnya pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 75,4% dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya menjadi 78,4%. Jadi rata-rata rasio belanja operasi Pemerintah Kota Medan selama 5 tahun periode sebesar 76,7%.

Tabel 7.
Rasio Keserasian Belanja Modal Pemko Medan Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal (%)
2014	Rp1.038.556.600.730	Rp4.625.169.924.881	22,5
2015	Rp1.349.672.255.161	Rp5.467.952.757.114	24,7
2016	Rp1.306.656.265.903	Rp5.735.922.591.995	22,8
2017	Rp1.352.895.789.273	Rp5.493.560.943.295	24,6
2018	Rp1.168.438.057.824	Rp5.449.562.922.528	21,4

Sumber: data olahan

Berdasarkan dari hasil perhitungan pada Tabel 7 diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Kota Medan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 terjadi kenaikan. Karena terdapat penambahan Belanja Daerah yang terdiri dari : Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 realisasi belanja daerah Kota Medan yaitu Rp 4.625.169.924.881, lalu pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya realisasi belanja daerah menjadi sebesar Rp5.467.952.757.114 dan pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp5.735.922.591.995. Kemudian, pada tahun 2017 dan 2018 terjadi sedikit penurunan karena berkurangnya Belanja Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Tak Terduga masing-masing menjadi Rp5.493.560.943.295 dan Rp5.449.562.922.528. Total realisasi belanja Modal daerah yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya mengalami kenaikan dan penurunan ditahun tertentu. Pada tahun 2014 total realisasi belanja modal yaitu Rp1.038.556.600.730, lalu pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp1.349.672.255.161 dan pada tahun 2016 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.306.656.265.903. Sedangkan pada tahun 2017 total belanja modal mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya menjadi Rp1.352.895.789.273 dan pada tahun 2018 justru menurun kembali dari tahun sebelumnya menjadi Rp1.168.438.057.824. Berdasarkan hasil dari perhitungan pada Tabel 7 diatas diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan jika dilihat dari belanja modal pada tahun 2014 yaitu 22,5%, lalu pada tahun 2015 mengalami kenaikan karena bertambahnya Belanja Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Tak Terduga menjadi 24,7%. Kemudian pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan dari

tahun sebelumnya karena berkurangnya Belanja Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Tak Terduga menjadi 22,8%. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 24,6% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya menjadi 21,4%. Jadi rata-rata rasio belanja modal Pemerintah Kota Medan selama 5 tahun periode sebesar 23,2%.

Rasio Pertumbuhan

Tabel 8.
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemko Medan Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Total Pendapatan Tahun t	Total Pendapatan Tahun t-1	Pertumbuhan	Rasio
2014	Rp1.900.484.785.689	Rp3.276.344.285.160	-Rp1.375.859.499.471	-41,99
2015	Rp4.181.096.448.524	Rp1.900.484.785.689	Rp2.280.611.662.836	120,00
2016	Rp4.308.116.916.025	Rp4.181.096.448.524	Rp127.020.467.501	3,04
2017	Rp4.409.065.482.201	Rp4.308.116.916.025	Rp100.948.566.176	2,34
2018	Rp4.253.618.758.533	Rp4.409.065.482.201	-Rp155.446.723.668	-3,53

Sumber: data olahan

Pada tabel 8 terlihat bahwa rasio pertumbuhan pendapatan daerah Pemko Medan Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 41,99% dari tahun sebelumnya dimana di tahun 2014 Pemko Medan tidak memperoleh pendapatan lainnya yang sah seperti dana bagi hasil pajak dan provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Tahun 2015 pertumbuhan pendapatan mengalami peningkatan sebesar 120%, hal ini disebabkan adanya peningkatan pendapatan yang berasal dari PAD dan pendapatan transfer. Tahun 2016 pendapatan daerah Pemko Medan mengalami peningkatan 3,04%, tahun 2017 juga mengalami peningkatan sebesar 2,34% dan di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 3,53% dari pendapatan tahun sebelumnya

Tabel 9.
Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Pemko Medan Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Total Belanja Tahun t	Total Belanja Tahun t-1	Pertumbuhan	Rasio
2014	Rp1.523.890.221.227	Rp3.224.449.048.409	-Rp1.700.558.827.182	-52,74
2015	Rp4.316.645.669.628	Rp1.523.890.221.227	Rp2.792.755.448.401	183,26
2016	Rp4.523.672.134.655	Rp4.316.645.669.628	Rp207.026.465.027	4,80
2017	Rp4.394.045.824.265	Rp4.523.672.134.655	-Rp129.626.310.391	-2,87
2018	Rp4.213.480.509.726	Rp4.394.045.824.265	-Rp180.565.314.538	-4,11

Sumber: data olahan

Selanjutnya berdasarkan tabel 9, rasio pertumbuhan belanja daerah Pemko Medan Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 52% dari tahun sebelumnya yang disebabkan mnurunnya jumlah belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Namun tahun 2015, rasio pertumbuhan belanja daerah Pemko Medan mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 183,26% peningkatan ini digunakan sebagai upaya untuk peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta utilitas kota, Peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat, peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas public, Peningkatan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup, Peningkatan penanaman modal daerah serta kemudahan pelayanan perizinan/non perizinan dan Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan kerja. Tahun 2016 rasio pertumbuhan belanja daerah Pemko Medan mengalami peningkatan 4,80%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 2,87% dan selanjutnya mengalami penurunan kembali di tahun 2018 sebesar 4,11% dari tahun sebelumnya.

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2014 -2018 dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggara kegiata pemetintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat cukup baik hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata rasio kemandirian sebesar 72,5% dengan pola hubungan partisipatif.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2014 dan 2018 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek efektifitas dan efisiensi.
3. Hasil derajat desentralisasi keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2014-2018 menunjukkan rasio cukup baik dengan kategori yang diperoleh yaitu "sedang". Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Derah terhadap total pendapatan daerah cukup tinggi dengan nilai rata-rata rasio sebesar 36,9%.

4. Pada rasio Keserasian, Pemko Medan dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional, yakni rata-rata tahun 2014-2018 sebesar 76,7%. Di lain pihak rasio belanja modal terhadap APBD Tahun 2014-2018 lebih rendah yaitu sebesar 23,2%.
5. Hasil rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif yang cukup signifikan. Maka dari itu, hal ini perlu menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintahan Kota Medan.

Daftar Pustaka

- Darwanis, Jalaluddin, Julitawati. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 15–29.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nazir, M. (2009). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 105 Tahun 2000, Pub. L. No. 105 (2000).
- Sucipto. (2005). Analisis Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Program Sarjana USU*. Medan